

Wetlands International Indonesia / Yayasan Lahan Basah

Policy Officer

Pada Proyek “Nature-based Solutions for Climate-smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM)”

Terms of Reference (ToR)



Nama Posisi:
Policy Officer



Atasan Langsung:
Project Coordinator



Lokasi Kerja:
Kalimantan Utara dan
Kalimantan Timur

“Nature-based Solutions for Climate-smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM)” adalah proyek yang akan berlangsung selama periode 2023 – 2028, dikelola bersama oleh Global Green Growth Institute (GGGI), Wetlands International, Yayasan Lahan Basah (Wetlands International Indonesia), dan University of British Columbia. Proyek ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu kegiatan Pemerintah Republik Indonesia dalam merestorasi 600.000 hektar mangrove yang telah mengalami degradasi. Kegiatan terutama akan dilaksanakan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, dengan fokus utama dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan tata ruang, perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas institusi dan koordinasi antar lembaga serta mobilisasi investasi mangrove berbasis masyarakat untuk revitalisasi, restorasi dan perlindungan ekosistem mangrove.

Keluaran utama dari proyek ini adalah berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi hijau melalui koordinasi yang lebih efektif dan bermanfaat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait mangrove pada tingkat desa, sub-nasional dan nasional yang secara langsung ataupun tidak langsung terpengaruh oleh dampak perubahan iklim. Sebagian besar manfaat proyek akan berupa dukungan terhadap peningkatan pendapatan komunitas masyarakat miskin dan melindungi mereka dari kerusakan pesisir yang diperburuk oleh perubahan iklim.

Policy Officer bekerja di bawah supervisi dari **Project Coordinator**, dan akan berkedudukan di Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur.



Profil Kandidat

Yang bersangkutan harus memiliki pengetahuan tingkat lanjutan terkait dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan lahan basah, khususnya mangrove, di Indonesia, maupun secara regional dan global. Kandidat harus mampu menterjemahkan ide,

gagasan dan analisa ke dalam analisa kebijakan, terutama di wilayah kegiatan proyek, dan mampu bekerja sama dengan Staf Teknis lain dalam pengembangan strategi pelestarian lahan basah, khususnya mangrove, dan pelaksanaannya.



Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Tugas dan tanggung jawab utama dari **Policy Officer** adalah:

1. Mendukung Proyek Nasclim dalam dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan strategi kebijakan yang efektif untuk pengelolaan mangrove yang bijaksana dan berkelanjutan di lokasi proyek, dengan berpedoman kepada arahan kegiatan Proyek;
2. Melakukan peninjauan kebijakan, legislasi, dan pedoman investasi yang relevan terkait pengelolaan mangrove di tingkat nasional dan daerah
3. Memfasilitasi diskusi pemangku kepentingan lintas sektor untuk merumuskan kerangka kebijakan terpadu bagi pengelolaan ekosistem mangrove berbasis solusi alam.
4. Mendukung integrasi rekomendasi kebijakan mangrove ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah
 - b. RPJMD Provinsi
 - c. RTRW provinsi dan kabupaten
5. Mendukung proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan integrasi pengelolaan mangrove berkelanjutan dalam perencanaan Pembangunan
6. Mendukung kajian diagnostik terhadap tata kelola kelembagaan pengelolaan mangrove.
7. Mengidentifikasi hambatan tenurial dan yurisdiksi yang mempengaruhi pengelolaan mangrove berkelanjutan.
8. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik tenurial dan koordinasi lintas sektor.
9. Mendukung kerangka **Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL)** berdasarkan Performance Measurement Framework (PMF).
10. Memetakan sistem pemantauan dan evaluasi yang sudah ada di daerah.
11. Melakukan koordinasi dengan mitra Pembangunan dalam mengkaji, menyusun, dan memproduksi bahan-bahan terkait kebijakan dan advokasi yang terkait dengan kegiatan Proyek;
12. Bekerjasama erat dengan pihak Mitra, Pemerintah, Donor, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan terkait kebijakan yang sejalan dengan arahan Proyek;
13. Terlibat aktif dalam proses penyusunan tata ruang yang diinisiasi Proyek;
14. Bekerjasama dengan Tim Mitra Proyek dalam penyusunan dan kegiatan lain yang terkait dengan kebijakan, sesuai dengan arahan Proyek;
15. Mendukung inisiatif pemerintah Republik Indonesia dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi dan rencana aksi tertentu, sesuai dengan arahan proyek;
16. Berkoordinasi dengan Project Coordinator dan Project Manager untuk melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan Proyek;
17. Mewakili Proyek dalam pertemuan terkait, termasuk presentasi mengenai kegiatan Proyek.



Kualifikasi yang Dibutuhkan

1. Pendidikan minimal **S2** di bidang kebijakan publik, kehutanan, lingkungan, perencanaan wilayah, atau bidang terkait.
2. Memiliki pengalaman minimal **5–7 tahun** dalam analisis kebijakan lingkungan, tata kelola sumber daya alam, atau perencanaan pembangunan.
3. Memahami kebijakan terkait:
 - pengelolaan mangrove
 - perubahan iklim
 - tata ruang
 - perhutanan sosial
4. Memahami pendekatan **gender equality dan social inclusion (GESI)**.
5. Berpengalaman bekerja dengan **pemerintah pusat dan daerah**.
6. Memiliki kemampuan fasilitasi **dialog kebijakan dan koordinasi multipihak**.
7. Memiliki kemampuan **analisis kebijakan dan penulisan laporan yang kuat**.



Proses Aplikasi

Pelamar diharapkan untuk mengirimkan:

1. Surat Lamaran Kerja.
2. Daftar riwayat hidup (CV).
3. Contoh 1-2 dokumen sejenis yang pernah disusun.

Kirimkan aplikasi ke: **admin@wetlands.or.id** dengan batas waktu pengiriman: 31 Maret 2026, pukul 17.00 WIB.

Catatan : hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang akan dihubungi untuk proses seleksi lebih lanjut.